



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PAPARAN MENTERI PERINDUSTRIAN PADA ACARA MUNAS XV HIPMI BANDUNG, 12 JANUARI 2015

Yth. :

1. Ketua Umum HIPMI beserta Pengurus Pusat HIPMI;
2. Para Peserta MUNAS HIPMI XV; serta
3. Para hadirin sekalian yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.

Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara MUNAS XV HIPMI. Semoga Saudara-Saudara pada acara ini dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja BPP HIPMI masa bakti 2011 – 2014 dan dapat menetapkan Kepengurusan Masa Bhakti 2015 – 2018.

Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan singkat mengenai “Pembangunan Industri Berbasis Maritim”.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga luas wilayahnya terdiri atas lautan. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri maritim. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Industri maritim yang akan dikembangkan pada periode 2015-2019 yaitu: (1) Industri Rumput Laut; (2) Industri Pengolahan Ikan; (3) Industri Galangan Kapal; dan (4) Industri Garam.

Untuk masing-masing industri tersebut, saya akan menyampaikan mengenai potensi, permasalahan, dan program pengembangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian.

A. INDUSTRI RUMPUT LAUT

Industri rumput laut nasional terdiri atas 25 unit usaha berskala besar yang menyerap 3.100 orang tenaga kerja, memiliki nilai investasi sebesar US\$ 170 juta. Industri rumput

laut nasional memiliki kapasitas terpasang sebesar 33 ribu ton dengan kemampuan produksi 20 ribu ton/tahun, sehingga menghasilkan utilisasi sebesar 60%.

Permasalahan yang dihadapi oleh industri rumput laut antara lain: suplai bahan baku terbatas untuk industri pengolahan rumput laut karena masih diekspor dalam bentuk mentah, kualitas bahan baku rumput laut yang rendah, biaya transportasi bahan baku masih mahal, utilisasi kapasitas terpasang industri pengolahan rumput laut belum optimal, serta infrastruktur untuk mendukung pengembangan industri pengolahan rumput laut masih terbatas.

Program pengembangan industri rumput laut antara lain:

1. Meningkatkan pasokan bahan baku rumput laut;
2. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir;
3. Pengembangan sarana dan prasarana industri pengolahan hasil laut antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah;
4. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan rumput laut;
5. Insentif Fiskal dan Non-Fiskal untuk pengembangan Industri Rumput Laut; dan
6. Pembangunan IKM Rumput Laut.

B. INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN

Industri pengolahan ikan nasional terdiri atas 37 unit usaha berskala besar yang menyerap 62.000 orang tenaga kerja, memiliki nilai investasi sebesar Rp 1,5 triliun. Industri pengolahan ikan nasional memiliki kapasitas terpasang sebesar 339 ribu ton dengan kemampuan produksi 197 ribu ton/tahun, sehingga menghasilkan utilisasi sebesar 58%.

Permasalahan yang dihadapi oleh industri pengolahan ikan antara lain:

1. industri hasil laut terutama olahan ikan, mengalami kekurangan bahan baku yang dikarenakan praktek *transshipment* ikan di tengah laut.
2. Belum adanya *Mutual Recognition Agreement* terkait saling pengakuan standar dengan ogist-negara tujuan ekspor hasil laut, sehingga banyak hasil pengolahan ikan yang ditolak oleh negara tujuan ekspor.

Program pengembangan industri pengolahan ikan yaitu:

1. Menjamin ketersediaan bahan baku;
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pengolahan ikan;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan inovasi teknologi industri pengolahan ikan;

4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk;
5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik; dan
6. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pengolahan ikan skala kecil dan menengah.

C. INDUSTRI GALANGAN KAPAL

Industri galangan kapal nasional memiliki potensi yang cukup besar. Untuk industri galangan kapal reparasi, jumlah fasilitas produksinya sebesar 214 unit dengan kapasitas 12 juta *dead weight ton* (DWT) per tahun dengan utilisasi sebesar 85%. Sedangkan galangan kapal baru, jumlah fasilitas produksinya sebanyak 160 unit dengan kapasitas 1,2 juta DWT per tahun dengan utilisasi sebesar 35%.

Permasalahan yang dihadapi industri galangan kapal antara lain: ketergantungan terhadap bahan baku & komponen impor masih tinggi, kemampuan fasilitas dan peralatan produksi terbatas dan berusia tua, masih lemahnya kemampuan desain kapal, belum harmonisnya kebijakan antara sektor industri perkapalan dan pelayaran, serta masih lemahnya kemampuan SDM dalam produksi kapal rakyat.

Program pengembangan industri galangan kapal antara lain:

1. Peningkatan kemampuan industri galangan kapal;
2. Pemberian fasilitas fiskal;
3. Peningkatan penguasaan teknologi, rancang bangun dan perkerayaan;
4. Mengembangkan pusat peningkatan keterampilan SDM;
5. Pemberdayaan IKM dalam produksi komponen kapal untuk memenuhi kebutuhan industri galangan kapal; dan
6. Pelatihan dan pendampingan pembuatan kapal rakyat di sentra-sentra potensial.

D. INDUSTRI GARAM

Industri garam terdiri atas 35 unit usaha berskala besar, dengan luas lahan produksi mencapai 22 ribu hektar dan kapasitas produksi 1,56 juta ton per tahun.

Permasalahan yang dihadapi industri garam antara lain: masih banyak garam konsumsi yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), belum diproduksinya garam industri dalam skala yang besar sehingga kebutuhan garam industri sebesar 1,9 juta ton/tahun masih diimpor, masih diselesaikannya permasalahan penyediaan lahan pegaraman di Kupang dan Nagekeo, serta masih rendahnya produktivitas garam.

Program pengembangan industri garam antara lain:

1. Ekstensifikasi lahan pegaraman di Provinsi NTT.
2. Intensifikasi lahan pegaraman di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan NTT.
3. Peningkatan kualitas garam melalui bantuan teknologi pengolahan garam.
4. Pengembangan IKM garam melalui pelatihan teknis produksi garam dan bantuan mesin/peralatan.
5. Pemberlakuan SNI wajib untuk garam industri; dan
6. Fasilitasi sertifikasi SNI wajib bagi IKM garam.

Saudara-Saudara Sekalian,

Dalam rangka mendukung pembangunan industri maritim, saya mengharapkan peran serta Saudara-Saudara yang tergabung dalam HIPMI antara lain sebagai berikut:

1. Berperan aktif dalam mendorong tumbuhnya industri maritim di daerah masing-masing;
2. Memfasilitasi akses pembiayaan bagi industri maritim khususnya IKM;
3. Berperan sebagai subkontraktor bagi industri galangan kapal, baik penyedia komponen maupun bahan baku terutama yang berasal dari dalam negeri;
4. Melakukan inovasi teknologi produksi turunan rumput laut (hilirisasi);

5. Mencarikan peluang pasar bagi industri pengolahan ikan dan rumput laut; serta
6. Mendukung penyediaan sarana transportasi dan distribusi bahan baku maupun hasil industri pengolahan ikan dan rumput laut.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada Saudara-Saudara sebagai bekal dalam menyiapkan diri menjadi pengusaha muda yang tangguh, profesional dan negarawan. Dan tidak lupa saya mengajak Saudara – Saudara untuk dapat mengembangkan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh dengan terus bersinergi dengan Pemerintah dan *stakeholder* lainnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN